

# PEMILU PRESIDEN AMERIKA SERIKAT

## *PRESIDENTIAL ELECTIONS IN THE UNITED STATES*

**Aisah Putri Budiatri**

Peneliti Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 10, Jakarta

*E-mail:* aisahputrib@gmail.com

Diterima: 5 Agustus 2013; direvisi: 20 September 2013; disetujui: 2 Desember 2013

Judul Buku : Presidential Elections: Strategies and Structures of American Politics

Editor : Nelson W. Polsby, Aaron Wildavsky, Steven E. Schier, dan David A. Hopkins

Penerbit : Rowman & Littlefield Publishers, Inc., Plymouth, United Kingdom, 2012.

Tebal : xiv + 337 hlm.

### ***Abstract***

*The United States of America has run presidential elections for more than a century. Democratic elections are a dynamic process with many changes in the rules and the systems. Nelson W. Polsby, Aaron Wildavsky, Steven E. Schier, and David A. Hopkins try to explain deeply about the evolution of American presidential election in their book: "Presidential Elections: Strategies and Structures of American Politics". In this book, the writers give details about presidential election from different eras that focus on several issues, namely voters, interest groups, rules and resources, the nomination process, and the campaign. Besides, the book attempt to ask about how presidential elections serve the purposes of democracy in the U.S.*

**Keywords:** *presidential election, the U. S., America, democracy*

### **Abstrak**

Amerika Serikat (AS) telah menjalankan pemilihan umum (pemilu) presiden selama lebih dari satu abad. Pemilu demokratis yang telah dijalankan oleh AS merupakan sebuah proses yang dinamis dengan banyak perubahan aturan dan sistem di dalamnya. Nelson W. Polsby, Aaron Wildavsky, Steven E. Schier, dan David A. Hopkins mencoba untuk menjelaskan secara mendalam evolusi (perubahan) pelaksanaan pemilu presiden di dalam buku "Presidential Elections: Strategies and Structures of American Politics". Di dalam buku ini, penulis memberikan gambaran rinci mengenai pemilu presiden di era yang berbeda-beda dengan berfokus pada beberapa isu diantaranya pemilihan pemilu, kelompok kepentingan, aturan dan sumber daya, proses nominasi, dan kampanye. Selain itu, buku ini mencoba menanyakan juga bagaimana pemilu presiden mampu mendukung tujuan demokrasi di AS.

**Kata kunci:** pemilu presiden, Amerika Serikat, demokrasi

## Pendahuluan

Pelaksanaan pemilu merupakan salah satu syarat penting bagi terciptanya sebuah negara yang demokratis. Amerika Serikat merupakan salah satu negara perintis demokrasi yang telah cukup lama dan berpengalaman dalam menjalankan pemilu yang adil, terbuka dan berkala. Pemilu presiden ini telah dijalankan Amerika Serikat sejak abad ke-18, saat sistem pemilu demokrasi baru saja berkembang. Jika dihitung mulai dari tahun 1928, AS telah memilih 13 presiden melalui sebuah mekanisme pemilu. Perjalanan panjang pemilu presiden AS tentu merupakan kajian yang sangat menarik sebagai pembelajaran politik atas sistem demokrasi saat ini.

Terdapat banyak ilmuwan dan peneliti yang menyoroti isu pemilu di Amerika, diantaranya Anthony King, Richard W. Boyd, Raymond E. Wolfinger, dan Stanley Kelley Jr. Namun, belum banyak kajian ilmiah yang berhasil melihat pemilu presiden sebagai suatu kajian yang utuh dan komprehensif. Umumnya, kajian hanya menyoroti satu isu tertentu di dalam pemilu, misalnya mengenai pemilih, kampanye, partisipasi pemilu, dan lainnya, atau kajian hanya melihat pemilu pada suatu periode tertentu saja. Dengan demikian, terdapat kekosongan ketersediaan kajian yang membahas pelaksanaan pemilihan presiden di AS secara menyeluruh dan komprehensif.

Nelson W. Polsby dan Aaron Wildavsky mengawali kajian pemilu presiden yang dilakukan secara utuh dengan menuliskan hasil analisa setiap kali pemilu sejak tahun 1964. Kajian ini kemudian disempurnakan oleh Steven E. Schier, dan David A. Hopkins hingga menghasilkan buku "Presidential Elections: Strategies and Structures of American Politics". Buku edisi ketiga ini telah diperbaharui dengan paparan analisa yang lengkap mengenai pemilu presiden mulai abad ke-18 hingga pemilu presiden tahun 2008. Di dalam buku ini, penulis membagi 7 babak tulisan yang meliputi kajian atas pemilih pemilu, kelompok kepentingan, aturan dan sumber daya pemilu presiden, proses pencalonan, kampanye, reformasi sistem pemilu dan partai politik, serta partai dan demokrasi.

Sebagian besar isi dari buku "Presidential Elections: Strategies and Structures of American Politics" memaparkan secara teknis pelaksanaan pemilu presiden, yakni mulai

dari tahap pra hingga pasca-pemilu. Penulis menjelaskan dengan rinci bagaimana Amerika Serikat menjalankan tahapan pelaksanaan pemilu, proses pencalonan presiden-wakil presiden oleh internal partai, kampanye, dan penghitungan suara. Tidak hanya itu, perbandingan pelaksanaan pemilu presiden dari masa ke masa menjadi dasar analisa buku ini untuk mengkaji kontribusi partai politik dan pemilu terhadap kehidupan berdemokrasi AS.

## Perilaku Pemilih Pemilu AS

Partisipasi pemilih dalam pemilu di Amerika Serikat selalu menjadi isu yang hangat dibicarakan oleh media dan pengamat politik dunia. Pembahasan ini selalu menarik karena di satu sisi, rakyat AS dikenal sebagai pemilih loyal partai, namun di sisi lain angka golongan putih (golput)-nya pun tinggi. Pada pemilu 2008 lalu, lebih dari 130 juta Rakyat Amerika memilih dalam pemilu, tetapi jutaan (mendekati 100 juta) lainnya tidak memilih.<sup>1</sup> Mengapa mereka memilih dan mengapa yang lainnya tidak memilih? Pertanyaan ini dijawab oleh penulis dalam bab muka buku ini.

Hopkins dan ketiga penulis lainnya mengutarakan beberapa argumen yang menjelaskan alasan banyak pemilih di AS tidak ikut serta dalam pemilu. Ketidakpuasan dan keterasingan terhadap sistem politik yang berjalan di AS menjadi salah satu penyebab yang seringkali disampaikan oleh para pengamat politik di Amerika. Argumen lainnya menyatakan bahwa kerumitan proses pelaksanaan pemilihan umum, khususnya pendaftaran menjadi pemilih pemilu, menjadi alasan banyak orang untuk golput.<sup>2</sup>

Bagi penulis, alasan yang paling tepat mengapa angka golput tinggi adalah kerumitan proses pemilu, terutama aturan di setiap negara bagian bahwa setiap orang harus mendaftar ulang untuk menjadi pemilih dalam setiap pemilu yang dilaksanakan. Tidak diterapkannya sistem registrasi yang otomatis disebabkan oleh mobilitas warga AS yang sangat tinggi, dimana dalam dua tahun terdapat rata-rata 30% warga

<sup>1</sup> Nelson W. Polsby, dkk., *Presidential Elections: Strategies and Structures of American Politics*, (Plymouth: Rowman & Littlefield Publishers, Inc, 2012), hlm. 3.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 3-8.

AS pindah dari satu negara bagian ke negara bagian lainnya. Tidak hanya itu, pelaksanaan pemilu yang dilakukan di hari kerja dan bukan merupakan hari libur nasional menjadi alasan sebagai warga AS menolak ke tempat pemilihan.<sup>3</sup>

Proses pemilu yang rumit telah disadari memiliki kontribusi terhadap tingginya masyarakat yang tidak ikut serta dalam pemilu di AS. Oleh karena itu, beberapa negara bagian telah membuat kebijakan untuk meningkatkan partisipasi pemilih di dalam pemilu, diantaranya kebijakan pendaftaran pemilih pada hari pelaksanaan pemilu, kemudahan pendaftaran pemilu bagi pemilih pemilu yang memiliki mobilitas tinggi, dan melakukan pemilihan suara sebelum pelaksanaan pemilu. Kebijakan tersebut berdampak positif terhadap pelaksanaan pemilu di Amerika Serikat, dimana 30% pemilih memanfaatkan kesempatan pemungutan suara sebelum hari pelaksanaan pemilu.<sup>4</sup>

Banyak kajian telah memberikan jawaban atas pertanyaan mengapa orang tidak memilih dalam pemilu AS, namun sebaliknya alasan mengapa orang memilih masih dipertanyakan hingga kini. Banyak akademisi yang mengkaji motivasi tersebut menyatakan bahwa pemilih melihat keterlibatan mereka dalam pemilu sebagai sebuah bentuk partisipasi politik warga terhadap komunitas di mana mereka tinggal. Oleh karenanya, masyarakat yang tinggal menetap di suatu tempat dalam waktu lama memiliki kesadaran politik lebih tinggi dibandingkan mereka yang seringkali berpindah. Mereka yang menetap tersebut akan memiliki keterikatan sosial yang lebih tinggi dengan komunitas tempat tinggal mereka, dan memutuskan untuk aktif dalam kegiatan politik di komunitas itu, termasuk memilih dalam pemilu.<sup>5</sup>

Ikatan keluarga, tingkat pendidikan, tempat tinggal, identifikasi kelompok politik merupakan faktor yang mempengaruhi warga untuk berpartisipasi di dalam pemilu. Warga AS yang terlibat di dalam sebuah ikatan keluarga, organisasi sipil, atau kelompok kepentingan tertentu memiliki partisipasi terhadap pemilu yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak terlibat. Ikatan-ikatan terhadap komunitas tersebut akan membentuk identitas sosial

seseorang yang pada akhirnya membentuk identitas politik, terutama identitas partai politik. Umumnya, loyalitas mereka terhadap partai politik tertentu berasal dari pengaruh interaksi sosial dalam keluarga dan masyarakat. Preferensi politik diturunkan di dalam keluarga dan ditularkan dari teman-teman di dalam komunitas sosialnya.<sup>6</sup>

Penduduk AS memutuskan untuk memilih dalam pemilu karena keterikatan hubungan yang kuat dengan komunitasnya. Saat mereka sudah berada pada satu komunitas politik tertentu, maka afiliasi politiknya pun terbentuk pada satu partai politik tertentu. Mereka pun akan menjadi pemilih loyal partai tersebut. Mereka cenderung mendengarkan argumen-argumen politik dari satu arah partai politik yang mereka pilih saja dan tidak tertarik dengan apa yang disampaikan oleh partai politik lainnya. Bahkan, mereka sudah menentukan akan memilih kandidat presiden dari sebuah partai politik meski proses kampanye pemilu belum dilakukan.<sup>7</sup>

Partai Demokrat dan Partai Republik menjadi dua partai politik yang memonopoli loyalitas pemilih pemilu presiden. Dalam sejarah AS, hanya pemilu presiden tahun 1860 dan 1912 saja yang pernah mencalonkan kandidat dari partai lain di luar Republik dan Demokrat. Dari 21 kali pemilu presiden diadakan di AS, Demokrat memenangkan 11 kali pemilu dan Republik 10 kali pemilu.<sup>8</sup>

Motivasi memilih partai politik yang didasarkan pada keterikatan atas komunitas menjadikan basis pemilih partai politik mudah untuk dipetakan. Partai Republik sukses di kota kecil dan area rural di Amerika bagian timur laut dan barat dan dalam lima puluh tahun terakhir juga sukses di daerah selatan. Sementara itu, Partai Demokrat didukung oleh pemilihnya yang berada di area urban di luar wilayah selatan, termasuk New York, Boston, Philadelphia, Chicago, Los Angeles, dan lainnya.<sup>9</sup>

Tidak hanya itu, latar belakang ekonomi, agama dan etnis juga berpengaruh terhadap peta kekuatan politik Partai Demokrat dan Republik. Pemilih Republik memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan dengan kelompok Demokrat, mereka umumnya

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 9-11.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 11-12.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 7-8.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 9-14.

adalah manajer atau pengusaha kecil. Selain itu, pemilih Republik umumnya adalah kelompok mayoritas yang meliputi orang kulit putih (74% dari pemilih pemilu 2008), pemilih berusia paruh baya, berpendidikan dan beragama Protestan. Sebaliknya, Pemilih Demokrat umumnya merupakan kelompok minoritas yang dirugikan dan memiliki ketertarikan terhadap program politik yang spesifik. Mereka diantaranya adalah imigran baru, kaum muda, kaum miskin, kelompok yang tidak berpendidikan, dan kelompok yang tidak membaaur di dalam masyarakat. Kelompok pemilih Demokrat umumnya merupakan kelompok masyarakat yang pernah merasa dirugikan, diantaranya *kelompok African-American*, gay, agama minoritas dan anggota perserikatan.<sup>10</sup>

Loyalitas pemilih terhadap partai umumnya sangat kuat dan jarang sekali berubah. Jika berubah, maka pemilih menunjukkan adanya perubahan dari loyalitas partisan ke loyalitas lemah, dari loyalitas lemah ke netral, atau ke golput. Umumnya, pemilih yang seringkali mengubah pilihan politiknya berasal dari kelompok pemilih independen. Pemilih independen tersebut umumnya menilai partai yang akan dipilihnya berdasarkan ideologi dan posisi partai terhadap isu-isu spesifik. Label ideologi yang secara umum digunakan terbagi menjadi ideologi kiri dan ideologi kanan (untuk isu ekonomi dan kesejahteraan sosial), serta ideologi liberal, dan ideologi konservatif (untuk isu hak asasi).<sup>11</sup>

Pemilih independen tidak dapat dikategorikan sebagai pemilih partai loyal karena orientasi politiknya yang selalu berubah-ubah. Namun demikian, kehadiran pemilih independen tidak dapat dipandang sebelah mata karena kelompok ini akan dapat sangat menentukan kemenangan kandidat di dalam pemilu. Sebagai contoh, dalam pemilu 2008, Obama menang dikarenakan peran pemilih independen. Meskipun di internal partai, Obama hanya meraih 89%, sementara McCain 90%, namun 44-52% pemilih independen memenangkan Obama.<sup>12</sup>

## Pemilu sebagai Agregasi Kelompok Kepentingan

Hidup partai politik di AS ditentukan oleh tiga basis kelompok partai, yakni : (1) pekerja profesional dan staf yang bekerja di dalam partai dan merepresentasikan dirinya sebagai bagian dari partai, (2) kandidat caleg atau presiden yang melabelkan dirinya kepada partai saat pencalonan, (3) aktivis partai, yakni kelompok orang yang aktif dalam kegiatan partai meliputi kampanye, pengumpulan dana, dan lainnya, namun tidak bekerja secara formal untuk partai dan tidak mencalonkan diri dalam pemilu. Aktivis partai ini erat hubungannya dengan kelompok-kelompok kepentingan dalam sebuah komunitas masyarakat di AS.<sup>13</sup>

Kelompok kepentingan di Amerika sangat berpengaruh dalam kehidupan partai politik, meskipun mereka belum tentu dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Hal ini sangat terlihat di dalam pelaksanaan pemilu presiden di AS. Polsby dan kawan-kawan menuliskan bahwa setidaknya terdapat tiga peran penting kelompok kepentingan dalam pemilu presiden yakni pertama, kelompok kepentingan dapat membantu menjadi penghubung bagi anggotanya untuk menemukan kandidat yang paling tepat untuk dipilih; kedua, kelompok kepentingan menjadi basis pendukung partai yang membantu kampanye dan menjaring konstituen untuk partai; dan ketiga, kelompok kepentingan mempengaruhi pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh kandidat atas isu tertentu sebagai timbal balik dorongan kampanye dan massa yang diberikannya.<sup>14</sup>

Kelompok kepentingan tidak hanya berperan sebagai pengumpul massa bagi partai politik, tetapi juga memiliki peran penting untuk menyokong kebutuhan finansial partai. Sistem politik di Amerika membuka peluang bagi kelompok kepentingan (kelompok serikat dan pebisnis) untuk memberikan sumbangan finansial kepada partai atau kandidat pemilu melalui *Political Action Committee* (PAC). PAC dapat menerima sumbangan dalam jumlah yang tak terbatas dan untuk kandidat yang tidak terbatas, tetapi ada keharusan bahwa satu penyumbang PAC tidak boleh memberikan lebih dari 5000 dollar. Jumlah kontributor PAC semakin meningkat dari tahun ke tahun yakni

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 25-33.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 18-21.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 25.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 42.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 33-34.

diawali dari hanya 89 di tahun 1974 hingga 1816 di tahun 1988. Namun, saat ini jumlahnya berkurang hingga menyentuh 1601 di tahun 2008.<sup>15</sup>

PAC merupakan bentuk perkembangan dari *Committee on Political Education* (COPE). COPE dibentuk oleh *the new American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations* (AFL-CIO) saat federasi buruh melebur di tahun 1955 untuk mengumpulkan dana sumbangan politik. PAC membuka ruang kepada publik untuk memberikan dana politik kepada partai, walaupun mereka bukan lah bagian dari AFL-CIO. Dengan demikian, dana politik untuk partai tidak hanya berasal dari kelompok kepentingan saja, namun terbuka menjadi lebih luas.<sup>16</sup>

Idealnya, PAC ditujukan agar partai politik menjadi lebih bertanggung jawab terhadap publik atas apa yang ditetapkannya sebagai kebijakan. Namun, hal yang terjadi justru tidak sesuai dengan tujuan awal dibentuknya PAC. PAC justru menciptakan hubungan klientisme yang kuat antara kelompok kepentingan dengan partai politik. Kelompok kepentingan, terutama kelompok pebisnis, yang memberikan sumbangan finansial akan memikirkan apa timbal balik partai terhadap mereka. Sangat penting bagi kelompok kepentingan untuk mengetahui apa yang dapat dilakukan oleh partai untuk kepentingan mereka. Dengan demikian, warga pun berbondong-bondong bergabung dengan kelompok kepentingan untuk mendorong kepentingan mereka masing-masing.<sup>17</sup> Alih-alih menciptakan partai yang kuat, partai politik saat ini justru semakin melemah posisinya di tengah rakyat.

## **Pencalonan Kandidat untuk Pemilu Presiden Amerika Serikat**

Pencalonan kandidat presiden merupakan langkah awal yang penting dalam setiap pelaksanaan pemilu presiden AS. Sejarahnya, nominasi presiden ditentukan oleh pimpinan dan elit partai politik yang mewakili negara-negara bagian, namun saat ini ditentukan oleh delegasi tersumpah yang dipilih juga melalui pemilihan pendahulu. Proses penentuan kandidat presiden

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 39-40.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 40.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 40.

AS saat ini lebih memakan waktu, memiliki proses yang kompleks dan memakan biaya tinggi.<sup>18</sup>

Langkah pertama untuk memasuki pencalonan presiden AS dimulai dengan pelaksanaan pemilihan pendahulu (*early primary election*) di Iowa dan New Hampshire. Pelaksanaan pemilihan pendahulu dilakukan di kedua negara bagian tersebut pada bulan Februari, sementara pemilihan pendahulu di negara bagian lainnya baru diselenggarakan pada bulan Maret dan Juni. Pemilihan pendahulu ini memiliki pengaruh yang penting dalam proses pemilu presiden karena sangat menentukan apakah kandidat presiden akan melanjutkan kepada pemilihan di negara bagian lain yang luas wilayahnya lebih besar atau tidak. Pemilihan pendahulu ini akan menentukan seberapa besar dukungan yang akan diberikan kepada para calon kandidat presiden. Oleh karena itu, banyak calon kandidat presiden mundur dari proses pemilu setelah kalah pada pemilihan pendahulu di Iowa dan New Hampshire ini.<sup>19</sup>

Selain pemilihan pendahulu, partai politik juga memiliki prosedur lain dalam menentukan delegasi yang akan memilih calon presiden dalam konvensi nasional, yakni melalui kaukus negara bagian dan superdelegasi. Sebagai contoh, di tahun 2008, lebih dari dua per tiga delegasi konvensi Partai Demokrat dipilih dari pemilihan pendahulu, 19% adalah superdelegasi dan 12% dipilih melalui kaukus atau konvensi negara bagian. Dua prosedur lainnya ini merupakan prosedur awal yang muncul dalam setiap proses pemilihan kandidat presiden untuk pemilu AS.<sup>20</sup>

Kaukus negara bagian merupakan metode yang umum digunakan oleh Amerika Serikat sebelum tahun 1972 untuk memilih kandidat presiden dengan berdasarkan pada keputusan pimpinan-pimpinan partai. Melalui metode kaukus ini, pimpinan partai secara otomatis mendapatkan kursi sebagai delegasi dalam konvensi untuk menentukan kandidat presiden. Oleh karena itu, pimpinan partai memiliki kekuatan yang besar untuk mengontrol hasil dari nominasi calon presiden ini.<sup>21</sup>

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 51.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 51, 100-111.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 96.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 124.

Superdelegasi adalah cara memilih delegasi konvensi nasional yang muncul sebagai upaya reformasi atas metode kaukus. Superdelegasi menjadikan kontrol pencalonan presiden oleh partai bukan hanya oleh elit partai dalam kepengurusan di tingkat negara bagian saja, tetapi juga menjadikan senator, gubernur, mantan presiden, mantan wakil presiden, dan pimpinan kongres sebagai delegasi dalam konvensi. Seperti halnya kaukus, maka kursi dari para superdelegasi juga otomatis diberikan tanpa proses pemilihan sebelumnya.<sup>22</sup>

Setelah ketiga proses tersebut dijalankan, maka konvensi nasional siap dilaksanakan untuk memilih kandidat presiden yang akan dicalonkan oleh partai politik dalam pemilu. Tren posisi ideologi partai politik terefleksi melalui kehadiran kelompok aktivis politik yang menjadi delegasi di dalam konvensi nasional, dimana delegasi Demokrat adalah sekelompok orang liberal dan Republik dipenuhi oleh sekelompok orang konservatif. Hal ini menunjukkan bahwa konvensi nasional tidak hanya menjadi sarana untuk menentukan kandidat presiden, namun juga merefleksikan posisi partai terhadap ideologi politik dan isu politik tertentu.<sup>23</sup>

## Kampanye Pemilu Presiden

### Amerika Serikat

Kampanye merupakan proses politik yang penting di dalam proses pemilu presiden Amerika Serikat. Kampanye menjadi alat partai politik untuk meyakinkan pemilih loyalis agar tidak memilih partai politik atau kandidat lain dan untuk membujuk pemilih independen yang belum menetapkan pilihannya. Namun, kampanye tidak ditujukan untuk mengubah pilihan pemilih loyalis dari partai berbeda.<sup>24</sup>

Dalam kampanye pemilu presiden, pemilih digiring ke dalam tiga isu utama kampanye, yakni isu ekonomi, isu politik luar negeri dan isu sosial. Partai Demokrat dan Republik menggiring ketiga isu tersebut dalam kerangka yang berbeda untuk menunjukkan keunggulan masing-masing partai. Pendekatan berbeda atas ketiga isu itu lah yang kemudian membentuk kelompok-kelompok loyalis partai,

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 126-127.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 128-129.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 147-148.

yakni mereka yang merasa kepentingannya terakomodir oleh partai.<sup>25</sup>

Dalam bidang ekonomi, Partai Demokrat dikenal sebagai partai yang membawa aspirasi kelompok pekerja dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Demokrat yang memiliki tendensi untuk mengusung pemikiran liberal membawanya pada penilaian positif masyarakat. Demokrat membawa beberapa isu diantaranya tentang upah minimum buruh, training untuk pengangguran, dan kebijakan sosial domestik lainnya. Sebaliknya, Republik lebih sering dilekatkan pada resesi dan ketidakberhasilan ekonomi. Hal ini didukung oleh peristiwa-peristiwa kegagalan ekonomi pemerintah di bawah kekuasaan Partai Republik, termasuk Depresi Ekonomi tahun 1929 dan beberapa kali resesi ekonomi sejak 1970 hingga 2009. Situasi ini memberikan keuntungan bagi Partai Demokrat di dalam pemilu. Oleh karenanya, isu ekonomi menjadi isu yang diunggulkan oleh Demokrat sebagai materi kampanye.<sup>26</sup>

Isu politik luar negeri yang muncul di dalam kampanye politik partai umumnya terkait dengan persoalan militer. Kenyataan bahwa Perang Dunia I dan II, Perang Korea dan Perang Vietnam terjadi pada masa pemerintahan Demokrat telah menciptakan asumsi masyarakat bahwa Demokrat cenderung membawa AS pada peperangan. Sebaliknya, Republik lebih dikenal sebagai partai yang cinta damai dan cenderung menahan diri untuk terlibat di dalam aliansi-aliansi internasional. Namun, belakangan ini, Demokrat justru diasumsikan sebagai partai perdamaian karena pemerintahan George W. Bush, seorang presiden yang diusung oleh Republik, mengusung okupasi militer terhadap Irak.<sup>27</sup>

Isu sosial dipahami sebagai isu yang terkait dengan kriminalitas, hak kelompok gay, aborsi, dan kontrol penggunaan senjata api. Berbicara mengenai isu-isu tersebut, Partai Republik lebih berpikir konservatif, sementara Demokrat berpikir dalam pandangan liberal sosial. Republik mencoba untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional di dalam masyarakat sehingga menentang eksistensi kelompok gay dan aborsi. Sebaliknya, Partai Demokrat berada pada sisi yang lebih progresif mendukung kelompok-kelompok tersebut. Namun demikian, saat ini,

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 152-158.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 153-155.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 155-156.

Demokrat lebih sering mengangkat isu ekonomi dibandingkan isu sosial di dalam kampanye-kampanyenya.<sup>28</sup>

Selain isu dalam kampanye, pemilih pemilu juga memperhatikan latar belakang kandidat yang diusung oleh partai. Kandidat diharapkan adalah orang yang dapat dipercaya, cerdas, dewasa, bijaksana, dan juga memiliki kehidupan keluarga yang baik. Kehidupan privasi kandidat menjadi bahan kampanye yang dapat mempengaruhi persepsi pemilih. Beberapa kandidat presiden mundur dari pencalonan dalam pemilu karena terungkap persoalan kehidupan pribadinya seperti yang dialami oleh Gary Hart di tahun 1987 (Nelson W. Polsby, dkk., 2012, hal.158-159).<sup>29</sup>

Di abad ke-19, kampanye pemilu presiden umumnya hanya mengandalkan struktur organisasi partai saja. Namun dalam perkembangannya saat ini, partai politik dan kandidat presiden mengatur pelaksanaan kampanye dengan bantuan konsultan politik, penasihat kebijakan dan pollster. Konsultan politik merupakan organisasi berbayar yang diminta untuk mengatur seluruh proses kampanye dan pengumpulan dana politik. Selain konsultan politik untuk kampanye, partai politik dan kandidat juga memiliki penasihat kebijakan. Penasihat kebijakan mengatur isu-isu kebijakan yang populis untuk diambil oleh kandidat presiden atau partai politik selama masa kampanye. Umumnya, penasihat kebijakan ini sudah mulai bekerja sejak dua tahun sebelum pemilu. Hal ini ditujukan untuk membangun reputasi kandidat presiden dan partai politik di hadapan publik. Kerja konsultan politik dan penasihat kebijakan dibantu oleh pollster, yakni pelaku survei publik. Survei publik sangat penting untuk membantu memetakan kekuatan politik, membangun strategi kampanye dan melihat isu strategis di masyarakat.<sup>30</sup>

Sistem pemilu AS memiliki pengaruh yang besar terhadap bentuk kampanye yang akan dijalankan oleh kandidat presiden dan partai politik. Sistem pemilu AS menghendaki presiden tidak hanya dipilih langsung berdasarkan suara terbanyak rakyat saja, namun juga terdapat “the electoral college” dimana setiap negara bagian menunjuk wakilnya untuk memilih kembali calon yang paling populer dari hasil pemilu

pertama (kecuali Maine dan Nebraska). Dalam sistem ini, setiap negara bagian wajib diwakili oleh minimal tiga suara, bahkan oleh wilayah negara bagian yang kecil sekalipun. Dampaknya terdapat ketimpangan antara satu negara bagian dengan negara bagian lain, contohnya Wyoming memiliki rasio 1 suara mewakili 84.886 pemilih dan di Florida terdapat 1 suara untuk 311.493 pemilih. Hal ini menyebabkan kandidat umumnya lebih berfokus untuk kampanye pada negara bagian yang berpenduduk padat dibandingkan daerah yang berpenduduk sedikit. Di tahun 2008, negara bagian yang menjadi target diantaranya adalah North Carolina, Wisconsin, Ohio, Pennsylvania, Florida, Indiana, Iowa, Minnesota, Missouri, Nevada, New Hampshire, New Mexico, Virginia, and Colorado.<sup>31</sup>

Sistem pemilu presiden AS yang bertahap dengan jangkauan wilayah yang sangat luas juga mempengaruhi biaya kampanye politik partai dan kandidat menjadi sangat tinggi. Di tahun 2008, Obama membutuhkan biaya 745 juta Dollar, sementara McCain 350 juta dollar. Kandidat presiden lainnya dari Demokrat mengeluarkan biaya sekitar 311 juta dollar dan Republik 248 juta dollar. Sementara itu, untuk pencalonan anggota senat dan parlemen dibutuhkan dana lebih dari 1,4 miliar dollar.<sup>32</sup>

Dana kampanye yang besar menjadi isu pokok yang dibahas oleh media dan pakar politik selama proses pemilu berlangsung. Partai politik dituntut untuk mendapatkan dana politik yang besar agar kampanye dapat dilakukan secara maksimal dan kandidatnya pun dapat memenangkan pemilu. Partai politik melakukan beragam cara berbeda untuk memenuhi kebutuhan dana politik tersebut, diantaranya menggalang relawan untuk mencari sumbangan dana politik dari komunitas dimana mereka tinggal, memanfaatkan media online (internet) untuk menggalang dana politik, dan mendapatkan bantuan dana federal.<sup>33</sup>

Sumber kampanye terbesar di Amerika saat ini masih berasal dari sumbangan politik individu dan kelompok-kelompok kepentingan. Umumnya, sumbangan yang besar berasal dari tiga negara bagian yakni New York, Washington, dan Los Angeles. Sumbangan ini dikumpulkan oleh tim relawan yang bekerja untuk mencari

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 156-158.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 158-159.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 160-161.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 51-52.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 53.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 53-58.

sumbangan dana politik dari lingkungan di sekitar mereka termasuk keluarga, teman, dan komunitas dimana ia tinggal. Namun demikian, dengan perkembangan media saat ini, maka penggalangan dana juga mulai dilakukan melalui media internet. Internet bahkan terbukti efektif mengumpulkan dana politik dalam jumlah yang besar. Selain itu, kandidat di dalam pemilu juga memanfaatkan internet untuk menggalang dana politik pencalonannya. Sebagai contoh, Obama berhasil menggalang dana politik sebesar 150 juta dollar dalam waktu satu bulan saja. Jumlah dana kampanye yang Obama yang terkumpul melalui internet membuatnya memiliki dana kampanye yang jauh lebih besar dibandingkan dana kampanye John McCain, saingannya.<sup>34</sup>

Tidak hanya sumbangan individu dan kelompok saja, partai politik juga bisa memperoleh dana politik dari pemerintah. Di tahun 1974, pemerintah federal melalui Federal Election Campaign Act (FECA) memberikan dana publik (dari pajak) untuk biaya politik kandidat yang telah mengumpulkan setidaknya 5000 dollar dari sumbangan individu. Dana publik dari pemerintahan federal tersebut akan dihargai sebesar 250 dollar/individu terhitung dari jumlah individu penyumbang yang sudah mereka kumpulkan sebelumnya. Namun, sebagai timbal balik, maka kandidat perlu memenuhi dua syarat yakni kandidat dilarang mengeluarkan uang sendiri atau dari keluarganya lebih dari 50.000 dollar dan kandidat harus membatasi dana kampanye yang dikeluarkannya untuk periode pre-nominasi (dibatasi sebesar 10 juta dollar di tahun 1974, dan dibatasi sebesar 54 juta dollar di tahun 2008).<sup>35</sup>

Sumbangan dana federal yang memiliki persyaratan ketat tersebut dinilai akan membatasi dana politik partai atau kandidat pemilu. Oleh karena itu, banyak kandidat presiden akhirnya memilih untuk tidak mendapatkan bantuan dana federal karena yakin mampu mendapatkan dana lebih besar serta tidak dibatasi oleh dua aturan kompensasi tersebut. Kandidat yang memilih tidak mendapatkan dana federal tersebut diantaranya Mitt Romney, Rudy Giuliani, John McCain, Mike Huckabee, Ron Paul, Fred Thompson, Hillary Clinton, Barack Obama, dan Bill Richardson. Meskipun tidak mendapatkan sumbangan dari pemerintah, Obama memiliki

dana kampanye sebesar \$350 juta, Clinton sebesar \$250 juta, dan McCain sebesar \$190 million. Dana tersebut jauh di atas dana 54 juta dollar yang dibatasi oleh ketentuan dana federal.<sup>36</sup>

Sebelum dilakukan pembatasan atas jumlah sumbangan politik di tahun 1970-an, pemilu presiden diasumsikan memang dipengaruhi secara tidak wajar oleh kepentingan uang. Namun, kemenangan pemilu tidak langsung dapat berkorelasi dengan jumlah dana politik yang dimilikinya. Sebagai contoh, pada pemilu tahun 1968, Partai Republik memiliki dana politik dua kali lebih besar dibandingkan Demokrat, tetapi Demokrat mampu mendapat suara 500.000 lebih banyak dibandingkan Republik. Walaupun terdapat fenomena anomali, uang kampanye yang besar terbukti berpengaruh kepada kemenangan sejumlah kandidat presiden. Sebagai contoh, Obama yang memiliki dana politik jauh lebih besar dari McCain mampu memenangkan pemilu. Tidak hanya Obama, presiden pemenang lainnya secara umum memiliki dana politik yang lebih besar dari kandidat lainnya.<sup>37</sup>

Sistem pemilu presiden yang mengharuskan para kandidat dan partai politik melakukan kampanye di setiap negara bagian membuat kampanye media menjadi alat efektif untuk memperoleh dukungan. Kampanye media digunakan oleh kandidat sebagai alat kontrol informasi di ruang publik, khususnya untuk meningkatkan popularitas kandidat presiden. Kampanye media dalam pemilu terbagi atas dua bentuk yakni, *free-media*, termasuk pemberitaan oleh media dan debat politik, dan media berbayar, termasuk kampanye iklan di televisi dan radio.<sup>38</sup>

Liputan media dapat sangat menguntungkan kampanye kandidat dalam pemilu, sebagai contoh, di tahun 2008, Obama mendapatkan keuntungan dari liputan media yang sangat tertarik pada pencalonan presiden pertama seorang *African-American*. Meskipun demikian, kampanye media tidak menjadi satu-satunya sumber yang berpengaruh bagi pemilih, pemilih juga mendapatkan pengaruh yang kuat dari lingkungan sosial di sekitar mereka termasuk keluarga, teman, organisasi keagamaan dan etnis, dan organisasi sosial lainnya. Oleh

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 57.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 59.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 60.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 65.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 73.



karena itu, kampanye secara langsung di setiap negara bagian, khususnya di negara bagian dengan populasi tinggi, tetap perlu dilakukan oleh kandidat presiden.<sup>39</sup>

## Reformasi Sistem Partai Politik dan Pemilu di Amerika Serikat

Telah disinggung sebelumnya bahwa dalam proses lebih dari satu abad Amerika Serikat menjalankan sistem politiknya, AS telah melakukan beberapa kali reformasi atas sistem pemilu dan partai politik. Reformasi ini bergulir sebagai pengaruh dari pemikir-pemikir politik abad dua puluh seperti Woodrow Wilson dan James Bryce. Mereka melakukan evaluasi atas fungsi dan legitimasi partai politik, kongres, presiden, serta akomodasi kebijakan atas kepentingan publik.<sup>40</sup>

Pemikir-pemikir reformasi politik menilai bahwa untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis di Amerika, maka dibutuhkan partai politik yang berkomitmen terhadap masyarakat pemilihnya, partai yang membawa kepentingan pemilihnya, partai yang membawa kebijakan alternatif bagi pemerintahan, dan partai politik yang memberikan pilihan-pilihan kebijakan alternatif bagi konstituennya. Dengan kata lain, partai politik didefinisikan sebagai asosiasi yang membawa tujuan konstituennya yang beragam menjadi kebijakan.<sup>41</sup>

Reformasi partai politik dilakukan agar partai politik menjadi saluran kepentingan rakyat. Partai politik tidak selalu secara serta merta mendukung satu kebijakan yang sama baik itu di tingkat lokal maupun nasional. Pemikir reformasi politik mendukung adanya perbedaan kepentingan meski dalam satu garis partai yang sama dengan asumsi anggota partai merupakan wakil dari kelompok kepentingan yang berbeda. Kebijakan nasional belum tentu sesuai dengan kepentingan di tingkat lokal, sehingga anggota partai di tingkat lokal dapat saja berbeda argumen dengan anggota partai di tingkat nasional. Hal ini menuntut dilakukannya diskusi oleh partai politik guna membahas keragaman kepentingan konstituen partai.<sup>42</sup>

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 9-14, 73.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 214

<sup>41</sup> *Ibid*.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 214-218.

Apa yang disampaikan oleh kelompok reformasi politik merupakan kritik terhadap konsepsi partai politik sebelumnya yang menempatkan partai politik sebagai agensi kompromi. Partai politik menjadi tempat konsensus kepentingan yang beragam untuk menghindari terjadinya konflik tajam antar kelompok kepentingan. Partai politik melakukan harmonisasi kepentingan yang beragam agar dapat menjadi satu kebijakan yang sama sebagai aturan main. Setiap kelompok kepentingan yang berbeda dituntut untuk kemudian menyesuaikan kepentingannya dengan aturan main tersebut, dan tidak lagi menyuarakan kepentingannya yang berbeda.<sup>43</sup>

Selain upaya reformasi partai politik, AS jugamemiliki gerakan reformasi yang mendorong berlangsungnya demokrasi partisipatif. Reformasi menuju demokrasi partisipatif ini dinilai menjadi jawaban atas kelemahan sistem politik Amerika, dimana pemilu dinilai tidak berhasil menjamin kepentingan rakyat (pemilih mayoritas) dapat terkomodasi dalam kebijakan-kebijakan pemerintah. Pokok pemikiran reformasi demokrasi partisipatif ini sesuai dengan pemikiran Jurgen Habermas bahwa demokrasi yang terlegitimasi dapat dibentuk oleh yang disebutnya “an ideal speech situation” atau situasi berbicara yang ideal, dimana setiap orang aktif dan memiliki ketertarikan yang sama untuk berpartisipasi politik. Setiap orang memiliki hak, sumber daya finansial, dan informasi yang sama untuk berpartisipasi politik secara efektif.<sup>44</sup>

Reformasi menuntut perubahan sistem pemilu dan partai untuk meningkatkan kualitas demokrasi terus bergulir selama lima puluh tahun belakangan ini. Namun demikian, reformasi tidak hanya digulirkan untuk memperbaiki sistem demokrasi saja, melainkan juga untuk hal-hal spesifik seperti proses nominasi, prosedur konvensi partai dan bentuk “electoral college”. Ketiga hal tersebut menjadi isu yang dianggap perlu diubah untuk mencapai sistem pemilu presiden yang lebih efektif.<sup>45</sup>

Tuntutan perubahan proses nominasi yang dilakukan adalah diusulkannya pelaksanaan pemilihan pendahulu dan kaukus yang berlaku serentak secara nasional di setiap negara bagian. Dengan demikian, tidak akan ada

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 247-248.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 223, 249.

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 224-237.

bobot yang lebih tinggi dari pelaksanaan pemilihan pendahulu seperti yang berlangsung di Iowa dan New Hampshire. Namun, ada juga usulan lain dimana waktu pelaksanaan pemilu pendahulu sebaiknya diseragamkan sesuai dengan kelompok wilayah geografisnya. Pemilu pendahulu dapat dilaksanakan secara bergiliran dengan empat kali waktu pelaksanaan berbeda.<sup>46</sup>

Reformasi pelaksanaan konvensi nasional partai menuntut adanya perubahan orientasi konvensi yang sejauh ini dinilai tidak memilih calon presiden terbaik, tetapi calon yang terpopuler. Calon presiden yang populer dinilai lebih penting karena pemilu presiden langsung menempatkan popularitas di mata publik menjadi faktor yang terpenting untuk memenangkan pemilu. Padahal, tujuan pelaksanaan konvensi tidak hanya untuk memilih kandidat yang menarik bagi publik, namun juga yang berkualitas baik dan memiliki kemampuan memimpin pemerintahan.<sup>47</sup>

*Electoral college* merupakan proses yang menarik di dalam pemilu presiden di AS. Banyak kalangan menilai bahwa pelaksanaannya harus dihapuskan untuk mendorong demokrasi murni yang didasarkan hanya pada pemilihan langsung oleh rakyat. Namun, terdapat kelompok reformis lain yang menilai bahwa *electoral college* tetap perlu dilaksanakan, tetapi perlu diatur perhitungan baru untuk alokasi suara yang mewakili masing-masing negara bagian. Kemungkinan lainnya adalah *electoral college* tetap dilaksanakan dengan penghitungan satu suara untuk setiap kemenangan di wilayah distrik dan dua suara untuk setiap kemenangan di wilayah negara bagian.<sup>48</sup>

## Partai Politik dan Demokrasi di Amerika Serikat

Saat ini, partai politik AS dituntut untuk menjalankan fungsinya sebagai advokat kebijakan, yakni partai yang berfungsi sebagai pembawa kebijakan yang berpihak terhadap kelompok massa pendukungnya yang beragam. Hal ini dianggap memiliki pengaruh yang penting untuk memantapkan demokrasi di Amerika Serikat. Namun, terdapat beberapa hal yang menjadi hambatan untuk mewujudkan

partai politik sebagai advokat kebijakan.

Kelompok kepentingan dan kelompok minoritas di AS berjumlah sangat banyak sehingga akan sulit bagi partai politik untuk mengakomodir seluruh kepentingan tersebut. Terlebih lagi, AS hanya memiliki dua partai politik sebagai kendaraan politik utama di dalam pemilu, sehingga akan sangat sulit untuk dua partai mampu menguasai keragaman kepentingan tersebut. Situasi ini juga yang terjadi di dalam pemilu presiden, dimana dua partai besar berkompetisi untuk memenangkan kandidatnya. Kandidat presiden akan kesulitan jika harus membawa program-program spesifik berbeda sesuai kepentingan kelompok yang berbeda-beda. Untuk efektivitas kemenangan dalam pemilu, maka harapan partai politik sebagai advokat kebijakan sulit untuk dicapai.

Mayoritas pemilih yang tidak ideologis juga menjadi hambatan untuk mewujudkan partai politik sebagai advokat kebijakan. Banyak pemilih AS tidak memilih partai politik atau kandidat berdasarkan program kebijakan yang mereka tawarkan, tetapi mereka memilih karena keterikatan mereka dengan komunitas loyalis partai tertentu. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa pemilih AS umumnya memilih karena pengaruh keluarga, organisasi sosial atau komunitas terdekatnya. Di luar itu, pemilih umumnya menentukan kandidat presiden pilihannya berdasarkan latar belakang figur dan karakter kandidat. Artinya, pemilih pemilu yang berorientasi pada program kebijakan pun masih minoritas.

Dengan situasi-situasi yang telah dijelaskan tersebut, maka bentuk partai sebagai advokasi kebijakan diragukan dapat terwujud di AS. Oleh karenanya, Polsby meyakini bahwa partai intermediasi menjadi lebih tepat dilekatkan kepada partai politik di AS saat ini dibandingkan dengan partai advokasi. Partai intermediasi diartikan sebagai partai yang berkemampuan sebagai penghubung berbagai kepentingan, termasuk kelompok kepentingan dan juga para implemen kebijakan, termasuk kongres, birokrasi, pemerintah kota dan pemerintah negara bagian. Artinya, kebijakan yang nantinya disampaikan oleh partai merupakan kompromi atas berbagai kepentingan.

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 224-228.

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 228-231.

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 231-237.

## Tinjauan Kritis terhadap “Presidential Elections: Strategies and Structures of American Politics”

“Presidential Elections: Strategies and Structures of American Politics” merupakan sebuah buku yang sangat komprehensif dalam menjelaskan pemilu presiden AS. Hal ini terbukti dari kemampuan buku ini merangkum perkembangan pelaksanaan pemilu presiden dari beragam sisi. Buku ini tidak hanya memaparkan proses pemilu secara teknis, namun juga membahas hal substansial seperti perilaku pemilih dan perkembangan pemikiran atas sistem politik yang ideal di negeri Paman Sam ini.

Poin penting yang menarik diulas dalam buku ini adalah penjelasan bahwa meskipun AS merupakan negara demokratis yang diasumsikan mapan oleh banyak pihak, nyatanya menyimpan banyak persoalan juga di dalam pelaksanaan pemilu presidennya. Persoalan pelik yang hingga kini dihadapi oleh Amerika Serikat diantaranya mengenai angka golput yang tinggi, kecenderungan partai politik memilih kandidat presiden populis dibandingkan kandidat yang terbaik kualitasnya, biaya politik tinggi, politik kompromistis antara kelompok kepentingan dengan partai, kerumitan sistem pemilu presiden dan berbagai persoalan lainnya. Hal-hal tersebut tentu berdampak negatif bagi kemapanan demokrasi AS saat ini. Oleh karena itu, reformasi atas sistem partai politik dan pemilu di Amerika Serikat tak henti-hentinya digulirkan hingga saat ini.

Namun demikian, buku ini luput membahas secara detil kontribusi kelemahan-kelemahan pelaksanaan pemilu presiden terhadap sistem demokrasi Amerika Serikat. Penulis memang telah menjadikan pembahasan itu sebagai sebuah kajian tersendiri di dalam bab terakhir buku ini, tetapi pembahasan lebih difokuskan kepada kaitan demokrasi dengan partai politik dan bukan pemilu. Sebagai buku yang melihat pemilu presiden sebagai inti kajian, maka seharusnya penulis lebih berfokus pada pelaksanaan pemilu demokrasi, sementara partai politik cukup menjadi elemen pembahasan di dalamnya.

Tidak hanya itu, di dalam pembahasan bab terakhir tidak dijelaskan juga bagaimana posisi

demokrasi AS saat ini dengan adanya beragam persoalan pemilu dan partai politik. Dengan angka golput tinggi dan politik kompromistis yang kuat, apakah demokrasi di AS sudah dapat dikategorikan sebagai demokrasi substansial? Atau masih terkategori demokrasi prosedural? Atau sesuai dengan konsep demokrasi yang diangkat di dalam buku ini, apakah sudah terkategori sebagai demokrasi partisipatif atau demokrasi deliberatif? Tidak ada penjelasan lebih dari penulis untuk memberi posisi atas demokrasi AS saat ini, meskipun penulis mengkhususkan bab terakhir untuk membahas lebih dalam terkait demokrasi.

Pembicaraan hubungan antara partai politik dengan demokrasi pun menjadi tidak terlalu relevan mengingat persoalan partai politik yang diangkat oleh penulis bukan lah hal spesifik yang terjadi di Amerika Serikat saja. Artinya, tidak ada yang terlalu menarik saat membahas karakter partai politik yang kompromistis karena hal ini juga terjadi pada partai politik di belahan dunia mana pun. Terkait dengan pemilu presiden AS, maka akan lebih menarik jika penulis menghubungkan demokrasi dengan dua hal yakni angka golput yang tinggi dan pelaksanaan *electoral college*. Hubungan demokrasi dengan kedua hal itu sempat dibahas oleh penulis namun tidak utuh dan tidak mendalam.

Apakah demokrasi AS dapat tetap dikategorikan sebagai demokrasi yang partisipatif dan substansial apabila tingkat golputnya sangat tinggi dan fluktuatif dari tahun ke tahun? Pertanyaan tersebut patut untuk dipertanyakan terus menerus karena merupakan persoalan nyata AS saat ini. Demokrasi akan berjalan semu apabila partisipasi rakyat di dalam sistem politiknya rendah. Dalam hal persoalan partisipasi politik ini, AS bahkan berada di bawah Belgia, Islandia, Denmark, Australia dan negara-negara lain yang memiliki tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu lebih tinggi dari 57%. AS telah memiliki prosedur pemilu langsung, namun hampir 50% rakyatnya tidak ikut memilih dalam pemilu.

Selain persoalan angka partisipasi politik yang rendah, sistem pemilu AS sendiri pun menuai persoalan bagi perjalanan demokrasi negeri Paman Sam ini. Banyak pengamat politik menilai bahwa dengan adanya penerapan *electoral college selain pemilu langsung*

menjadikan pemilu AS kurang demokratis. Bahkan hal ini pula yang menjadikan banyak politisi di Indonesia menilai bahwa pemilu presiden Indonesia lebih demokratis dibandingkan pemilu presiden AS.<sup>49</sup> Pemilu demokratis yang utuh adalah pemilu yang didasarkan pada pemilu langsung, bukan kolaborasi antara pemilu langsung dan tidak langsung. Sementara itu, konstitusi AS membangun sistem pemilu presiden sebagai kompromi antara pemilihan melalui pemungutan suara di kongres dan pemilihan oleh suara terbanyak warga pemilih.<sup>50</sup>

Kedua persoalan tersebut merupakan isu khas yang ditemukan di AS, sehingga akan sangat menarik untuk diungkap lebih dalam keterkaitannya dengan kematangan demokrasi yang diterapkan. Meskipun dua persoalan tersebut dianggap sebagai persoalan mayor dari pemilu presiden (korelasinya dengan demokrasi) saat ini, namun ada hal lain termasuk keterbukaan proses pemilu dan intimidasi politik yang juga mencederai demokrasi AS. Kedua hal ini penting tetapi luput diperhatikan oleh penulis. Hal ini penting untuk dilihat karena bagaimana pun juga AS adalah mercusuar atas pelaksanaan demokrasi di dunia, sehingga membawa nilai penting sebagai pelajaran bagi negara-negara lainnya.<sup>51</sup>

Tidak hanya lemah dalam pemaparan pada bab terakhir, namun terdapat beberapa poin yang juga luput di dalam kajian buku ini. Beberapa hasil penelitian sumber lain memberikan penjelasan yang berbeda atas apa yang coba diangkat oleh Polsby dan kawan-kawan di dalam buku ini. Cara pandang yang berbeda ini terutama menyoroti persoalan perilaku pemilih dalam pemilu.

Polsby dan ketiga penulis lainnya menekankan bahwa penyebab tingkat partisipasi pemilu yang rendah dititikberatkan pada sistem pemilu AS yang rumit. Namun, Gianfranco Baldini dan Adriano Pappalardo menekankan kepada lemahnya parpol menjalankan fungsi

organisasi politik sebagai penyebab golput.<sup>52</sup> Pada dasarnya, penulis telah menjelaskan posisi lemah partai politik AS, termasuk misalnya ketidakmampuan mengakomodasi isu dan program, sifat partai yang kompromistis, dan hal lainnya. Namun, tidak ada penjelasan di dalam buku ini bahwa kelemahan tersebut berhubungan dengan partisipasi yang rendah dari masyarakat. Ketidakmampuan partai politik untuk memainkan fungsi organisasi menjadikan tingkat kepercayaan publik terhadap partai, pemilu dan sistem politik rendah. Hal itu juga yang menyebabkan masyarakat malas untuk ikut dalam pemilu, karena mereka tidak yakin suaranya akan dihitung dan berpengaruh terhadap kehidupan politik AS.<sup>53</sup>

Buku ini juga mengkategorikan pemilih pemilu AS secara tegas antara pemilih loyal dan pemilih independen. Keduanya dinilai oleh Polsby dan kawan-kawan sebagai kelompok yang memiliki perilaku memilih berbeda secara signifikan terutama loyalitasnya terhadap partai, dimana pemilih loyal cenderung memiliki pilihan tetap dan pemilih independen sebaliknya. Namun, William G. Mayer memiliki temuan berbeda atas hal tersebut. Menurutnya, pemilih pemilu AS tidak dapat terkategori secara ajeg karena sifatnya dapat berubah.<sup>54</sup>

Berdasarkan survei, 40-60% pemilih independen merupakan partisan partai. Artinya, meskipun mereka adalah pemilih independen, namun mereka telah memiliki kecondongan preferensi terhadap partai tertentu.<sup>55</sup> Dalam situasi ini, maka tidak tepat jika dikatakan pemilih independen adalah kelompok non-partisan murni, karena mereka juga sudah memiliki kecenderungan pilihan dalam pemilu.

Pemilih loyalis juga bukan suatu kelompok pemilih pemilu yang kaku, karena diantara mereka juga terdapat pemilih partai yang cair. Menjadi seorang partisan partai di AS tidak berarti tidak dapat mengubah pilihannya dalam pemilu. Menurut temuan

<sup>49</sup> "Basuki: Indonesia lebih demokratis dari AS", 13 Maret 2013, [www.nasional.kompas.com](http://www.nasional.kompas.com), diakses pada tanggal 24 April 2013.

<sup>50</sup> "Bagaimana Proses Pemilihan Presiden AS?", 7 November 2012, [www.gatra.com](http://www.gatra.com), diakses pada tanggal 14 April 2013.

<sup>51</sup> Matthias Maass, *The World Views of The US Presidential Election 2008*, (New York: Palgrave Macmillan, 2009), hlm. 3.

<sup>52</sup> Gianfranco Baldini dan Adriano Pappalardo, *Election, Electoral Systems and Volatile Voters*, (New York: Palgrave Macmillan, 2009), hlm. 47.

<sup>53</sup> Alan Marzilli, *Election Reform 2010*, (New York: Chelsea House Publishers, 2011), hlm. 12.

<sup>54</sup> William G. Mayer, "The Swing Voter in American Presidential Election", *American Politics Research*, Vol. 35, No. 3, 2007, Sage Publications, hlm. 366-367.

<sup>55</sup> *Ibid.*

William, angka rata-rata antara tahun 1952-2004, ditemukan setidaknya 19% partisan loyal Partai Demokrat beralih memilih Partai Republik di dalam pemilu, dan 10% partisan loyal Partai Republik memilih Demokrat.<sup>56</sup> Dari angka tersebut terbukti pemilih Republik lebih loyal dibandingkan pemilih Partai Demokrat. Namun, keduanya terbukti bukanlah loyalis partai murni.

Berdasarkan data dan uraian William tersebut, maka terbukti bahwa sulit untuk melakukan pengkategorian pemilih pemilu secara ketat seperti yang dilakukan oleh Polsby dan kawan-kawan. Kecenderungan perubahan orientasi pilihan partai sangat nampak bahkan oleh pemilih loyalis partai, sebaliknya pemilih independen pun tak sepenuhnya non-partisan. Papan William tersebut tentu menunjukkan sekali lagi kelemahan argumentasi di dalam buku ini.

## Penutup

Buku “Presidential Elections: Strategies and Structures of American Politics” layak menjadi bahan bacaan acuan untuk melihat perjalanan pelaksanaan pemilu presiden di Amerika Serikat. Buku ini telah berhasil menggambarkan kompleksitas pemilu presiden dari berbagai sudut termasuk, aturan pemilu, proses pemilu, pemilih pemilu bahkan peserta pemilu. Tidak hanya melihat keunggulan pelaksanaan pemilu presiden di Amerika Serikat, Polsby dan ketiga rekannya juga menguraikan kelemahan-kelemahannya. Meskipun demikian, buku ini memiliki beberapa celah kekurangan dalam pemaparan data dan analisa, khususnya dalam mengangkat pola hubungan pelaksanaan pemilu presiden dengan pelaksanaan demokrasi AS. Adapun catatan penting dari buku ini adalah bahwa pelaksanaan demokrasi merupakan sebuah proses terus-menerus yang ditandai oleh perbaikan sistem politik termasuk sistem pemilu dan partai politik, begitupun proses yang dilalui oleh Amerika Serikat. Meskipun AS dianggap sebagai negara demokratis yang mapan, hingga saat ini negeri Paman Sam ini selalu memperbaiki sistem dan aturan yang dimilikinya untuk menemukan sistem pemilu dan partai politik yang ideal.

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

## Daftar Pustaka

### Buku

- Baldini, Gianfranco, dan Adriano Pappalardo. 2009. *Election, Electoral Systems and Volatile Voters*. New York: Palgrave Macmillan.
- Maass, Matthias. 2009. *The World Views of The US Presidential Election 2008*. New York: Palgrave Macmillan.
- Marzilli, Alan. 2011. *Election Reform 2010*. New York: Chelsea House Publishers.
- Nelson W. Polsby, dkk. 2012. *Presidential Elections: Strategies and Structures of American Politics*. Plymouth: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.

### Jurnal

- Mayer, William G. 2007. “The Swing Voter in American Presidential Election”. *American Politics Research* 35(3).

### Surat Kabar dan Website

- “Bagaimana Proses Pemilihan Presiden AS?”. 2012, [www.gatra.com](http://www.gatra.com). 7 November.
- “Basuki: Indonesia lebih demokratis dari AS”. 2013. [www.nasional.kompas.com](http://www.nasional.kompas.com). 13 Maret.